

# **PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)**

**Pembimbing I**

**Dr. Firdaus, SH., M.Si  
NIP. 196103051989031002**

**Penulis**

**ANDI YUL L.T.G, S.Ik  
A.21211075**

**Pembimbing II**

**Mei Sulawesi Yanto, SH., MH  
NIP. 195805281986021001**

## **A B S T R A K**

Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Kabupaten Sintang). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal, faktor-faktor yang menyebabkan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal, serta upaya perlindungannya. Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal dikarenakan keterbatasan dana/keuangan, jumlah personil dan disiplin ilmu dari personil Unit Pelayanan Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (UPK-PPA) Polres Sintang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sintang selaku lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang belum mendapat perlindungan secara optimal dikarenakan: (a) kurangnya kesadaran korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian; (b) kurangnya pengetahuan hukum dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan hak-haknya; dan (c) kurang percayanya masyarakat (korban) kepada sistem hukum Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun saran yang diberikan. Pertama, adalah perlu adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan perlindungan, mengingat perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bersifat teoritis tetapi dalam pelaksanaannya korban tidak mendapat perlindungan yang layak. Kedua, adalah perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban. Dan ketiga, adalah perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar pola pikir yang

menyatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berubah.

**Kata Kunci :** Perlindungan – Korban – Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **A B S T R A C T**

This thesis discusses the protection of victims of crime of domestic violence (case study in Sintang). In addition, it also has a goal is to reveal and analyze the causes of crime victims of domestic violence do not get optimal protection, the factors that lead to crime victims of domestic violence do not get optimal protection, as well as safeguard. Through empirical legal research methods with socio-juridical approach the conclusion, that the cause of crime victims of violence do not get optimal protection due to lack of funding / finance, the number of personnel and personnel disciplines of Special Protection Unit for Women and Children (UPK-PPA) Police Sintang and Integrated Service Center of Women and Children (P2TP2A) Sintang as institutions that provide protection to victims of domestic violence. The factors that cause domestic violence victims in Sintang not get optimal protection due to: (a) lack or awareness of crime victims of domestic violence to report their case to the police, (b) lack of knowledge of the law of domestic violence victims household in defending their rights, and (c) lack of public disbelief (the victims) to the Indonesian legal system, so they do not have the grip or the certainty that they will get out of the clutches of the offender. Protection of victims of domestic violence in Sintang done with efforts to prevent domestic violence and efforts to support victims of domestic violence as well as the recovery of victims of domestic violence.

The advice given. First, is the need for the protection of victims of crime of domestic violence in a concrete either from the police, local authorities and institutions / organizations that specifically provide protection, given the protection afforded Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence only theoretical but in actual victims without adequate protection. Second, is the need for a means of protection against crime victims of domestic violence, considering that if the victim suffered trauma or hospitalization in the end had to return home for fear of causing casualties. And third, it is necessary to outreach to community members that mindset that states the position of men is higher than women, giving rise to the crime of domestic violence can be changed.

**Keywords:** Protection – Victims – Domestic Violence

## A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, satu sama lain saling pengertian, saling asah, asuh dan asih serta pengendalian diri dalam menghadapi persoalan.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Akan tetapi, apabila sampai pada hal yang menyakitkan apakah fisik maupun mental keadaan ini sudah menjadi persoalan lain.

Apabila salah satu merasa keamanan dirinya terancam atau mengalami penderitaan fisik atau psikis, hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Menko Kesra mengatakan pada tahun 2007, 75% pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami.<sup>1</sup> Hubungan pelaku dengan korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yang salah satu kewajibannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yakni menuju masyarakat yang adil, makmur, aman dan sentosa, maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang sampai menimbulkan akibat seperti tersebut di atas, tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus adanya perlindungan terhadap korbannya dalam bentuk

---

<sup>1</sup>[www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id), diakses pada tanggal 7 November 2012.

aturan hukum yang dapat menggunakan daya paksa untuk mengatasinya, merupakan tindakan hukum melalui aparaturnya.

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat tentang ancaman hukuman bagi pelaku, baik berupa perlindungan hukum bagi korban maupun dalam bentuk penal yang diberikan kepada pelakunya, dimaksudkan dapat mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, atau setidaknya dapat mengurangnya secara maksimal.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang tersebut, adalah memperhatikan kenyataan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat kita, di mana pada umumnya kekuasaan suami lebih dominan sesuai dengan adat budaya bangsa yang meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga.

Pandangan tersebut tidak terlepas dari pandangan negara yang didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga juga beragam bentuknya, seperti: kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Permasalahan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sintang, di mana dalam media massa diberitakan telah terjadi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan data dari Satuan Reskrim Polres Sintang bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang dari tahun 2010 hingga bulan Juli tahun 2013 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2010 terdapat 8 kasus, kemudian pada tahun 2011 terdapat 10 kasus, tahun 2012 terdapat 16 kasus dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan Juli terdapat 6 kasus.

Dari 40 (empat puluh tiga) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dinyatakan selesai, baik hingga ke Pengadilan maupun secara *restorative justice* ataupun kekeluargaan 27 kasus yaitu pada tahun 2010 sebanyak 6 kasus, kemudian pada tahun 2011 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 14 kasus, dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan Juli sebanyak 4 kasus. Sedangkan sebanyak 13 kasus yang belum selesai masih menunggu hasil penyidikan. Dan jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling banyak adalah jenis kekerasan penganiayaan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan bentuk perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta lembaga/organisasi yang secara khusus

memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia.

Harus diakui bahwa kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan korban berada pada posisi yang kurang dijamin hak-haknya, baik haknya sebagai manusia maupun haknya sebagai masyarakat, lebih jauh dari itu haknya sebagai perempuan dalam persamaan gender.

Dari adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Sintang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal ?
3. Bagaimana upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang ?

## **BAB II**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sebab-Sebab Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Mendapatkan Perlindungan Secara Optimal**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. **Nawal El Saadawi** menggambarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi sejak adanya suatu budaya.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Masalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Selama ini memang Pemerintah telah berupaya untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun dalam kenyataannya, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dirasakan belum optimal dan jauh dari harapan. Salah satu hal yang tampak jelas lemahnya undang-undang ini disebabkan karena tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

---

<sup>2</sup>Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), halaman 1-177.



Padahal dalam kenyataannya, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sintang, di mana dalam media massa diberitakan telah terjadi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sintang dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2013, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sintang Dari Tahun 2010 s/d Bulan Juli Tahun 2013**

Tahun	Kasus Tindak Pidana KDRT	
	Lapor	Selesai
2010	8	6
2011	10	3
2012	16	14
Juli 2013	6	4
Jumlah	40	27

Sumber Data: Sat Reskrim Polres Sintang, Tahun 2013.

Berdasarkan data dari Satuan Reskrim Polres Sintang bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang dari tahun 2010 hingga bulan Juli tahun 2013 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2010 terdapat 8 kasus, kemudian pada tahun 2011 terdapat 10 kasus, tahun 2012 terdapat 16 kasus dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan Juli terdapat 6 kasus.

Dari 40 (empat puluh tiga) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dinyatakan selesai, baik hingga ke Pengadilan maupun secara *restorative justice* (kekeluargaan) sebanyak 27 kasus yaitu pada tahun

2010 sebanyak 6 kasus, kemudian pada tahun 2011 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 14 kasus, dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan Juli sebanyak 4 kasus. Sedangkan sebanyak 13 kasus yang belum selesai masih menunggu hasil penyidikan.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* (kekeluargaan), maka *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Kemudian selanjutnya untuk mengetahui jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**

**Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Terhadap Istri**

No.	Jenis Kekerasan	Tahun			
		2010	2011	2012	Juli 2013
1.	Penganiayaan	8	9	13	6
2.	Psikis	-	-	-	-
3.	Seksual	-	1	2	-
4.	Penelantaran rumah tangga	-	-	1	-
	Jumlah	8	10	16	6

Sumber Data: Sat Reskrim Polres Sintang, Tahun 2013.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri di Kabupaten Sintang dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2013, mayoritas adalah jenis kekerasan penganiayaan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari status dan keadaan korban, korban kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi *biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga, pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak karena secara anatomi dan fisiologi tubuh, kekuatan dan fisik perempuan berbeda dan lebih lemah dibandingkan lelaki.

Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat digolongkan menjadi *socially weak victim* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkan ia menjadi korban. Hal ini disebabkan oleh budaya dan kebiasaan masyarakat serta pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinari laki-laki. Kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan sebagai kepala keluarga. Posisi yang *superior* menyebabkan dirinya sangat berkuasa di tengah-tengah keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai kekerasan terhadap anggota keluarga tidak ada seorangpun dapat menghalanginya.

Dengan melihat kenyataan ini, maka perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terlihat diabaikan walaupun sebenarnya masalah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Diabaikannya eksistensi korban (*victim*) dalam penyelesaian kejahatan menurut **Arif Gosita**, yang dikutip oleh **G. Widiartana**, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.

3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia sebagai manusia sesama kita).<sup>3</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Mendapatkan Perlindungan Secara Optimal**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga, sehingga bukan hal yang aneh apabila kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki.

Posisi laki-laki yang demikian *superior* seringkali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya tidak ada seorangpun dapat menghalanginya. Lebih parah lagi,

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 8-9.

perilaku laki-laki tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).

Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

- a. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam praktiknya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah keluarga, melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Masyarakat belum memahami betul bahwa tidak kekerasan dalam keluarga merupakan suatu perbuatan pidana yang membahayakan jiwa manusia serta hak asasi manusia, sehingga banyak korban yang tidak melapor atau enggan untuk melaporkan.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baru benar-benar bertindak jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat

berdampak semakin menguatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 ternyata belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya, bahkan aparat penegak hukum sendiri masih banyak yang belum memahami apalagi memberlakukannya.

### **C. Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sintang**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi bentuknya beragam, seperti: kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Harus diakui bahwa selama ini bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan yang seharusnya didapat korban kekerasan dalam rumah tangga hanya angan-angan.

Banyak korban kekerasan rumah tangga yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang ke rumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.



## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Menutup uraian penelitian tesis ini, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan secara optimal dikarenakan keterbatasan dana/keuangan, jumlah personil dan disiplin ilmu dari personil Unit Pelayanan Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (UPK-PPA) Polres Sintang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sintang selaku lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Adapun faktor-faktor penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang belum mendapat perlindungan secara optimal dikarenakan: (a) kurangnya kesadaran korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian; (b) kurangnya pengetahuan hukum dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan hak-haknya; dan (c) kurang percayanya masyarakat (korban) kepada sistem hukum Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.
3. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. S a r a n**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan perlindungan, mengingat perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bersifat teoritis tetapi dalam pelaksanaannya korban tidak mendapat perlindungan yang layak.
2. Perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban.
3. Perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar pola pikir yang menyatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU / LITERATUR :

- Amalia, E., 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga: Analisa Kasus Pada Beberapa Keluarga di Wilayah Ciputat*, Unpublished Research Report PSW IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1997, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah Seminar, Surakarta.
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djannah, Fathul, dkk., 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS Yogyakarta bekerjasama dengan CIDE-ICIHEF Jakarta dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Fakih, Mansour, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan Perspektif Gender*, dalam Bainar (ed.), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1995, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hasbianto, Elli N., 1996, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kaum Perempuan dalam Perkawinan*, Unpublished Conference Paper, The Center of Research Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Langley, R., D. Ricard, dan C. Levy, 1987, *Memukul Istri*, Terjemahan R. Mosasi, Cakrawala, Jakarta.
- Luhailima, A.S., 2000, *Pemahaman Terhadap Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Fewler al, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meiyanti, S., 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.

- Prayudi, Guse, 2008, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Separovic, Zvonimir Paul, 1985, *Victimology, Studies of Victim*, Zagreb.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- , 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sumbayak, Radisman F.S., 1985, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL & Co, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Jakarta.
- Shaffmeister, S. & N. Keijzer & PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- United Nations, *A Compilation of International Instruments*, Volume I, New York, 1993, halaman 382.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1990, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya.

-----, 1975-1976, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, FH-UNAIR.

-----, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM-HUMA, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen I, II, III dan IV).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.